

KILAS

APPI Dukung OJK Tutup
Aplikasi Mata Elang

PERSPEKTIF

OJK Susun Peta Jalan
Keuangan Berkelanjutan

www.ifsas.or.id

APPI ASOSIASI
PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
INDONESIA

MULTIFINANCE

September 2021



**PENINGKATAN DAYA SAING
MEMBANGUN SDM UNGGULAN
DI SEKTOR JASA KEUANGAN**



adaptif

Platform untuk Industri Pembiayaan & Leasing Global yang Berkembang

Dengan bangga melayani berbagai perusahaan kelas dunia di bidang pembiayaan & leasing dengan teknologi perangkat lunak yang pintar.

SOLUSI UNTUK:



Pembiayaan
Multiguna



Pembiayaan
Kendaraan Roda 4



Pembiayaan Alat
Berat dan sejenisnya



Pembiayaan
Kendaraan Roda Dua



Pembiayaan
Wholesale



CONFINS.R3

Siap Mendukung Strategi *Digitalisasi* Anda

Kini dilengkapi dengan
Digital Signature

- Kurangi *hidden operational cost*
- Percepat proses *approval*
- Ciptakan *Paperless Environment*
- Kurangi kesalahan manusia



e-Materai
COMING SOON

**REQUEST
FOR DEMO**



0859 5900 8500
marketing@ad-ins.com



DAFTAR ISI



7 FOKUS

PENINGKATAN DAYA SAING **Membangun SDM Unggulan** **di Sektor Jasa Keuangan**

Penguatan sumber daya manusia atau SDM di industri jasa keuangan menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan di tengah perkembangan sektor keuangan yang dinamis dan beralih ke layanan-layanan berbasis digital.

6 Sambutan

Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI
SDM Kuat, Industri Sehat

12 Profil

Andryan Harris, Direktur LSPP
Digitalisasi Layanan Sertifikasi

16 Kilas

- 167 Perusahaan Pembiayaan Bertahan
- APPI Dukung OJK Tutup Aplikasi Mata Elang
- Kualitas Debitur Restrukturisasi Perlu Terus Diawasi
- Momentum Bank Salurkan Pinjaman ke Industri Pembiayaan
- Perkuat Bisnis, Arthaasia Finance & Hitachi Capital Finance Indonesia Merger

- Lelang Kendaraan Lesu Selama Pandemi
- Harga Saham Emiten Perusahaan Pembiayaan Cerah

24 Perspektif

- Pasar Mobil dan Motor Bekas Stabil
- Dorong Efisiensi Industri OJK Susun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan
- Mengintip RUU KUP yang Baru
- Eksekusi Jaminan Fidusia Jalur Pengadilan Hanya Alternatif

32 Forum Komunikasi Daerah (FKD) Kegiatan Bantuan Sosial

34 Daftar Anggota APPI

Dapatkan Souvenir menarik dari APPI bagi yang menuliskan artikel dalam majalah *Multifinance*. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai informasi ini, dapat menghubungi Sekretariat APPI di Telp. (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id



Vaksin dan CSR

Pemimpin Umum:

Suwandi Wiratno

Penanggung Jawab:

Sigit Sembodo

Rosalina Dhanudimuljo

Gusti Wira Susanto

Roni Haslim

Hafid Hadeli

Andreas Manik

Tetsushi Tanaka

Pemimpin Redaksi:

Sri Haryati

Sekretaris Redaksi:

Wellyani

Daniel Darmadi

Sirkulasi/Distribusi:

Sekretariat APPI

Program vaksinasi oleh pemerintah saat ini gencar dilakukan, termasuk oleh perusahaan di industri jasa keuangan. Sejalan dengan itu, partisipasi perusahaan dibutuhkan untuk mempercepat proses vaksin. Hal yang ingin saya tanyakan, apakah program vaksin yang dilakukan untuk karyawan dan keluarga karyawan bisa masuk dalam kategori kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan dan komponen biayanya masuk dalam program tanggung jawab sosial itu? Terima kasih

Mohammad As'ad

Lampung

Sehubungan dengan biaya vaksinasi, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan surat no S-136/NB.11/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Pencatatan atas Biaya Vaksinasi Masyarakat dan Biaya Swab Karyawan mengenai syarat dan ketentuan biaya vaksinasi masuk dalam kategori CSR perusahaan. Mohon kiranya surat tersebut dapat dijadikan acuan. Terima kasih, red

Bunga Tabungan

Seperti ramai menjadi pembicaraan, pemerintah sedang melakukan revisi terhadap berbagai ketentuan perpajakan. Mohon bantuan dari Majalah Multifinance untuk bisa memberikan informasi mengenai hal ini dan juga dampaknya bagi perusahaan pembiayaan, terima kasih

Cecilia Leni Murvita

Kudus

Majalah Multifinance edisi September mengangkat topik mengenai RUU KUP yang baru dalam rubrik perspektif, semoga informasi yang diulas tersebut dapat bermanfaat, terima kasih, Red

ALAMAT REDAKSI:

Kota Kasablanka

(EightyEight@Kasablanka)

Tower A Lantai 7 Unit D

email: sekretariat@ifsa.or.id

website: www.appi.id

Telp: 021-2982 0190

Fax: 021-2982 0191

Suwandi Wiratno,

Ketua Umum

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

SDM Kuat, Industri Sehat

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa keuangan tengah menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan. Regulator tentu menyadari perkembangan industri jasa keuangan yang makin pesat, tetap perlu diimbangi dengan kapasitas tenaga kerja yang mumpuni.

Belum lama ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan cetak biru pengembangan SDM di sektor jasa keuangan. Selain itu, otoritas juga menerbitkan Peraturan OJK No. 11/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan.

Hal ini dikarenakan, transformasi bisnis keuangan yang terus berkembang, dan penerapan

manajemen risiko, serta situasi ekonomi global, membuat OJK perlu memperkuat kesiapan SDM ke depan.

Bagaimana pun, SDM merupakan ujung tombak bagi sektor jasa keuangan untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan mengedepankan aspek prudensial.

Bagi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), kunci sukses dari ekosistem sektor jasa keuangan termasuk industri pembiayaan yang berkembang, berada di tangan SDM baik dari *level* pelaksana lapangan hingga pengambil keputusan.

APPI menyadari peningkatan SDM merupakan hal penting. Oleh karena itu, sejak 2015 APPI mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI) yang bertujuan untuk membangun sumber daya yang unggul.

Jumlah peserta yang ikut dalam program sertifikasi yang digelar LSPPI menunjukkan bahwa ada partisipasi aktif secara sadar perusahaan pembiayaan untuk meningkatkan SDM dan berkontribusi bagi peningkatan ekonomi.

APPI juga menghargai apresiasi OJK terhadap LSPPI, lembaga yang telah dibangun untuk membantu meningkatkan standar kompetensi SDM di industri pembiayaan.

Ke depan, APPI berkomitmen dan meningkatkan kerja sama agar kualitas SDM di industri pembiayaan terus meningkat. APPI akan terus mencermati perkembangan di industri jasa keuangan, lalu mengimplementasikannya dalam modul-modul untuk peningkatan standar profesionalitas SDM, terutama di industri pembiayaan.

Kontribusi yang diberikan bukan semata-mata untuk menjaga industri pembiayaan terus tumbuh. Lebih dari itu untuk meningkatkan peran terhadap peningkatan ekonomi serta menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap industri ini. (*)





PENINGKATAN DAYA SAING

Membangun SDM Unggulan di Sektor Jasa Keuangan

Penguatan sumber daya manusia atau SDM di industri jasa keuangan menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan di tengah perkembangan sektor keuangan yang dinamis dan beralih ke layanan-layanan berbasis digital.

Regulator menyadari bahwa perkembangan itu perlu diimbangi dengan kesiapan SDM yang mumpuni. Kendati industri keuangan memiliki regulasi yang ketat, penerapan aspek *good corporate governance* (GCG) akan berjalan dengan optimal apabila seluruh komponen pelaksananya yakni SDM mampu menjalankan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.

Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan bahwa

OJK perlu menyusun Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan karena berbagai pertimbangan, seperti *competency gap* SDM, disrupsi digital yang mentransformasi bisnis proses layanan keuangan, perlunya penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) sebagai pondasi ketahanan lembaga keuangan, perkembangan kondisi ekonomi global yang semakin terbuka dan potensi ekonomi syariah di Indonesia yang sangat tinggi.

“Dengan berbagai kondisi tersebut, SDM SJK harus mampu merespons berbagai tantangan tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM, sehingga dapat mewujudkan SDM SJK yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan sendiri,” ujarnya.

Atas dasar itu, katanya Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021—2025 diterbitkan sebagai pedoman atau acuan bagi para pemangku kepentingan di masing-masing industri sektor jasa keuangan, termasuk OJK dalam membuat strategi dan menjalankan program peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang dilaksanakan secara terencana, terukur, sesuai dengan kebutuhan, berkelanjutan dan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan terkait.

Selaras dengan hal tersebut, OJK juga telah mengeluarkan ketentuan berupa Peraturan OJK (POJK) tentang penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). POJK dikeluarkan untuk memastikan bahwa skema sertifikasi dan proses pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP telah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan.

Dengan demikian, lanjut Nurhaida sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan LSP sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan industri jasa keuangan sendiri.

Nurhaida menambahkan Indonesia memiliki potensi menjadi *big emerging market*, terutama potensi besar yang dimiliki oleh sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, salah satu pilar pendukung dari peran serta SJK dalam pertumbuhan ekonomi nasional adalah pengembangan SDM yang perlu mendapat perhatian khusus, terus dioptimalkan dan berkesinambungan. Selanjutnya, aspek pengembangan SDM juga menjadi sangat penting untuk memastikan dana-dana masyarakat akan dikelola dengan baik, akuntabel dan tetap dalam kerangka kehati-hatian.

Sejalan dengan perspektif itu, OJK melihat pengembangan SDM telah berlangsung dengan

baik yang didukung sepenuhnya oleh komitmen dari seluruh pelaku industri jasa keuangan.

“Pengembangan SDM berlangsung sejalan dengan dinamika perkembangan jasa dan produk industri jasa keuangan, termasuk perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perubahan yang begitu luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang layanan jasa keuangan,” katanya.

Dia menuturkan transformasi digital di sektor jasa keuangan tidak hanya berdampak pada pengembangan infrastruktur saja, namun juga harus diikuti dengan pemenuhan kompetensi SDM SJK agar teknologi digital yang digunakan dapat tepat guna dan tepat sasaran.

“*Digital mindset, digital leadership, dan digital literacy*, disamping kemampuan teknis lainnya harus menjadi fokus dalam rangka penguatan SDM SJK bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan di era keuangan digital saat ini,” ujar Nurhaida.

SERTIFIKASI DI INDUSTRI PEMBIAYAAN

Terkait dengan penguatan SDM di industri pembiayaan, Nurhaida menuturkan penilaian kualitas SDM di suatu sektor industri, termasuk industri pembiayaan akan sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas SDM yang berlangsung secara berkesinambungan.





Secara khusus, Nurhaida memuji peran Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI) yang secara adaptif menerapkan ujian secara online selama masa pandemi sehingga proses pelatihan dan sertifikasi tetap dapat berjalan secara normal.

“Saya mengapresiasi upaya pimpinan di industri pembiayaan untuk terus meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan mampu bersaing dengan industri keuangan lainnya. Saat ini, persaingan terjadi khususnya berlangsung terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk menunjang penyaluran pembiayaan saat masa pemulihan ekonomi,” katanya.

Secara khusus, Nurhaida memuji peran Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI) yang secara adaptif menerapkan ujian secara *online* selama masa pandemi sehingga proses pelatihan dan sertifikasi tetap dapat berjalan secara normal.

“Kami tetap berharap LSPPI terus meningkatkan standar sertifikasi sejalan dengan perkembangan yang terjadi, termasuk teknologi digitalisasi dan OJK akan akomodatif untuk memastikan proses sertifikasi oleh LSPPI tetap berjalan efektif,” jelasnya.

Pelaksanaan sertifikasi yang digelar LSPPI di industri pembiayaan sudah memenuhi unsur

untuk menciptakan keunggulan SDM dan mampu mengakomodasi kebutuhan sertifikasi bagi pelaku di industri pembiayaan.

Pelaksanaan sertifikasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu memerhatikan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur yang berlaku.

Nurhaida menjelaskan keterbatasan aktivitas selama pandemi membuat penggunaan teknologi menjadi vital untuk menggenjot kinerja. Oleh karena itu, SDM di industri pembiayaan harus terus bertransformasi mengingat disrupsi digital memberikan dampak yang cukup signifikan.

Hal penting lainnya yang diperlukan saat ini adalah SDM yang berkarakter *agile*, memiliki sikap adaptif dan kolaboratif.

“Memiliki SDM yang kompeten dalam teknologi digital, merupakan suatu keniscayaan agar dapat mengantisipasi perubahan bisnis proses sebagai dampak dari penggunaan teknologi,” ujarnya.

OJK meyakini bahwa kebutuhan untuk melakukan pengembangan SDM melalui berbagai pelatihan dan pelaksanaan sertifikasi merupakan wujud konkret penciptaan SDM yang profesional dan memiliki daya saing regional hingga global.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, kualitas sertifikasi akan sangat ditentukan oleh kualitas standar sertifikasi yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sejalan dengan ini, OJK sangat mendukung LSP yang didirikan oleh asosiasi, yang tentu berkomitmen agar kualitas sertifikasi tetap terus ditingkatkan.

“Kami sangat berharap agar LSPPI, yang didirikan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia), juga memiliki semangat dan visi misi yang sama. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh LSPPI harus mengacu pada skema sertifikasi, yang telah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),” katanya.

Regulator akan terus mendorong LSPPI agar meningkatkan kualitas dan efektivitas program sertifikasi di bidang pembiayaan sehingga SDM di industri pembiayaan memiliki kompetensi tinggi dan keunggulan kompetitif

Beberapa program yang telah dan akan dilakukan oleh OJK terkait dengan penguatan SDM:

- 1 Menerbitkan cetak biru pengembangan SDM SJK yang merupakan hasil diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pengawas di Industri Pembiayaan dan asosiasi serta praktisi di Industri Pembiayaan.
- 2 Menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan dan melakukan bimbingan teknis terkait implementasi peraturan/regulasi atau kebijakan terkait.
- 3 Menyusun dan menetapkan standar kompetensi secara nasional bagi SDM sektor jasa keuangan atau yang sering kita sebut dengan SKKNI dan KKNI.
- 4 Menyelenggarakan program pengembangan SDM SJK secara masif dan berkesinambungan, antara lain dalam bentuk webinar dengan topik-topik yang terkait secara khusus dengan industri jasa keuangan.
- 5 Mengembangkan media pembelajaran digital bagi SDM SJK yang rencananya akan kami luncurkan pada tahun ini.
- 6 Mendorong asosiasi industri/profesi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai tersertifikasi.
- 7 Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan sehingga terwujudnya *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha (jasa keuangan).
- 8 Melakukan bimbingan teknis terkait implementasi peraturan/regulasi atau kebijakan terkait.

Data OJK pada 2020 mencatat dari sebanyak 184 perusahaan pembiayaan, baru 28 perusahaan atau 15,22% yang telah menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaannya baik menggunakan *web application* maupun *mobile application*.

OJK menyadari bahwa Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK harus dilakukan secara terstruktur, terukur dan didukung sepenuhnya oleh komitmen semua pihak yang terkait, termasuk industri jasa keuangan.

Sebagai langkah awal, OJK Institute (OJKI) selaku *Project Management Office* (PMO) Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK telah menginisiasi pembentukan Forum

Komunikasi Pengembangan SDM SJK yang terdiri dari perwakilan satuan kerja terkait di OJK dan asosiasi industri/profesi yang bertugas untuk memastikan cetak biru tersebut terimplementasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, regulator juga telah menyusun manual implementasi 17 program kerja yang diambil dari program strategis di cetak biru. Selanjutnya, OJK akan menginisiasi *strategic partnership* dengan *stakeholders* terkait guna mendukung implementasi cetak biru secara efektif.

OJK bersama asosiasi industri akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan program kerja sebagaimana tertuang dalam cetak biru tersebut. (*)

DAFTARKAN SEGERA

UJIAN ONLINE

DIKLAT ONLINE

TANGGAL TUTUP PENDAFTARAN

Manajerial

19 OKT 2021

11 - 16 OKT 2021

29 SEP 2021

Direksi
& Komisaris

IND

22 SEP 2021

21 - 22 SEP 2021

09 OKT 2021

ENG

27 OKT 2021

26 - 27 OKT 2021

14 OKT 2021

**Profesi Penagihan
oleh Perusahaan
Pembiayaan**

Sejak **2017**, perusahaan pembiayaan sudah dapat mendaftarkan sendiri ujian **Sertifikasi Profesi Penagihan** setiap **Senin s/d Sabtu** pukul **08.00 - 19.00** (5 sesi pilihan).

TANPA LIMIT JUMLAH PESERTA (UNLIMITED)

#AyoSertifikasiOnline



INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI:

021-29820180

info@sppi.co.id

Digitalisasi Layanan Sertifikasi

Sektor jasa keuangan belakangan mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, pelaku industri dihadapkan pada fenomena digitalisasi di industri jasa keuangan. Meningkatnya kontribusi sektor jasa keuangan, perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga profesional yang berkecimpung di sektor itu. Guna mengetahui peran dalam pengembangan sumber daya manusia, berikut wawancara dengan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI) Andryan Harris:

Bisa dijelaskan singkat peran LSPPI?

Kalau cerita dari sejarah adanya LSPPI, mulainya lembaga ini dibentuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada 2015. Lembaga ini didirikan untuk melaksanakan amanat Peraturan OJK No. 28/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Dalam satu pasal POJK itu, agar praktisi di industri memiliki sertifikat kompetensi. Kami dibentuk untuk melaksanakan amanat tersebut dan membantu industri dapat melakukan sertifikasi seluruh sumber daya manusia (SDM) secepat mungkin.

Kalau tidak salah, saat itu perusahaan pembiayaan sudah harus memenuhi ketentuan itu paling lambat 2017 untuk karyawannya memiliki sertifikasi. Karena mendapat amanat, kami melihat peran lembaga menjadi cukup penting. Oleh karena itu, kami mulai menyusun metode sertifikasi, skema sertifikasi, baik itu untuk tenaga penagihan, direksi, sampai dengan komisaris. Materi uji kami siapkan.

Sejak awal kami bekerja untuk membantu industri memenuhi dan *comply* dengan POJK tersebut dengan melaksanakan sertifikasi untuk tenaga profesi penagih, kepala cabang sampai satu *level* di bawah direksi, hingga direktur dan komisaris.

Sejalan dengan perkembangan, pada 2020, kami bersama dengan regulator dan APPI menyusun dan merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pembiayaan dan telah terdaftar resmi di Kemenaker.



Pada 2021, juga bersama dengan APPI dan OJK menyusun dan merumuskan skema sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pembiayaan.

Dalam skema KKNI ini diatur jenjang 4, 5, dan 6. Untuk jenjang 6 dibagi dua, subbidang pengawasan dan subbidang pengelolaan. Prinsipnya sama, jenjang 4 untuk tenaga profesi penagih, jenjang 5 mulai dari kepala cabang sampai satu *level* di bawah direksi, jenjang 6 subbidang pengawasan untuk komisaris, dan subbidang pelaksanaan, di *level* direksi.

Berapa lama jangka waktu berlakunya sertifikasi kompetensi?

Saat ini, jenjang 4 dan jenjang 5 masa berlaku sertifikasi 3 tahun. Setelah 3 tahun, mereka harus melakukan resertifikasi atau ujian ulang. Adapun untuk direksi dan komisaris cukup sekali mengikuti sertifikasi. Tapi, setiap tahun direksi dan komisaris harus memenuhi *refreshment point* (poin penyegaran)

Komisaris dan direksi harus memenuhi poin yang kami tetapkan. Komisaris wajib memenuhi 5 poin penyegaran, direksi 10 poin penyegaran. Poin ini indikatornya dihitung dari beberapa pilihan kegiatan yang dapat diikuti dan diakui oleh LSPPI, misalnya seminar OJK dan/atau APPI. Mereka wajib mengirimkan bukti kepesertaan dalam kegiatan di luar itu untuk dihitung sebagai

poin. Kalau poinnya kurang, direksi atau komisaris harus melakukan resertifikasi ulang.

Apa pertimbangannya masa berlaku sertifikasi hanya 3 tahun?

Industri pembiayaan ini secara regulasi belum selengkap sektor perbankan. Kami dengan sadar perlu membekali SDM di industri pembiayaan dengan kompetensi yang memadai agar industrinya juga mapan. Dunia bisnis berubah ubah secara cepat dan drastis termasuk dari sisi teknologinya. Saat itu kami bersama dengan APPI menetapkan masa 3 tahun itu masa paling ideal untuk menjadikan SDM di industri *agile* dan memiliki kualitas diri yang prima serta siap menghadapi tantangan di depan. Kalau 5 tahun, mungkin terlampau lama Dan itu terbukti, dalam 3 tahun dunia bisnis cepat berubah, ada hal-hal baru yang muncul baik dari sisi regulasi yang diperbarui dan berganti.

Selama pandemi Covid-19, seperti apa mekanisme sertifikasi yang dijalankan LSPPI?

Sejak awal pandemi pada Maret 2020, kami menyiapkan metode sertifikasi secara ujian *online*. Seluruh pelatihan persiapan sertifikasi dilaksanakan *online* juga oleh APPI.

Sampai saat ini, kami sudah melakukan sertifikasi terhadap 130.000—150.000 praktisi dan profesional di industri pembiayaan.





Sejak awal pandemi pada Maret 2020, kami menyiapkan metode sertifikasi secara ujian *online*. Seluruh pelatihan persiapan sertifikasi dilaksanakan *online* juga oleh APPI.

— **Andryan Harris,**
Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi
Pembiayaan Indonesia (LSPPI)

Dalam sistem kami juga memberikan *tools* menu untuk melindungi sesama perusahaan pembiayaan dari oknum karyawan yang beritikad tidak baik. Fasilitas menu ini adalah sarana komunikasi pasif antara perusahaan pembiayaan untuk dapat melihat karyawan bersertifikasi yang melakukan pelanggaran (*fraud*) di perusahaan sebelumnya. *Tools* menu TSR / DSR ini dapat diakses oleh seluruh perusahaan pembiayaan.

Masih sering terdengar keluhan masyarakat tentang perilaku jasa penagih dan saat menjalankan tugasnya tidak dibekali identitas. Apa pendapat LSPPI?

Kalau indikatornya kasus, justru saat ini sejak ada kewajiban sertifikasi tindakan tidak menyenangkan oleh tenaga penagih di lapangan jauh menurun. Artinya, dengan adanya sertifikasi ini, ada kaidah-kaidah yang dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan dan tenaga penagihnya, terutama yang sudah memiliki sertifikasi.

Hal lain, sejak didirikan sejatinya kami sudah mengarah ke digitalisasi. Setiap pemegang sertifikat di LSPPI tercatat dan masuk dalam *database* kami dan itu bisa di cek. Pemegang sertifikasi ada kode *quick response* (QR) yang itu bisa di *scan* oleh masyarakat. Memang kami mengakui, hal-hal seperti ini belum tersosialisasi dengan baik. Namun, perlu dipahami oleh masyarakat bahwa setiap tenaga lapangan, tenaga jasa penagih yang sudah memiliki sertifikasi, bisa diminta untuk menunjukkan kartu sertifikasi LSPPI. Semacam e-card [*electronic card*] yang bisa diakses melalui *mobile phone*.

Bagaimana kesadaran perusahaan pembiayaan melakukan sertifikasi?

Jika dilihat dari jumlah peserta, kami melihat kesadaran perusahaan pembiayaan terus meningkat dan cukup baik.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan SDM yang berbobot di industri pembiayaan terus meningkat. Ini juga sejalan dengan kebutuhan industri dan memberikan kenyamanan kepada debitur. Perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip yang sesuai aturan, tentu mampu menjaga kepercayaan debitur. (*)



PEFINDO

INDONESIA'S MOST TRUSTED CREDIT RATING AGENCY

PRODUCT & SERVICE

1. Corporate Credit Ratings

2. Debt Instrument Ratings

Bonds

Medium Term Notes (MTN)

Sukuk

Commercial Paper

3. Structured Finance Ratings

Project Finance

Securitization Assets Backed Securities

Real Estate Investment Trust

Infrastructure Investment Trust

4. Municipality Ratings

5. Indexing Services

6. Publication

PEFINDO
i-Grade

PEFINDO25
SME INDEXES

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Senayan City, 17th Floor

Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia

Phone: 62-21-7278-2380 Fax: 62-21-7278-2370

www.pefindo.com



167 Perusahaan Pembiayaan Bertahan

JAKARTA — Jumlah pelaku usaha di industri pembiayaan tercatat terus menyusut sampai dengan semester I/2021. Berkurangnya pemain di bisnis pembiayaan itu akibat banyak hal, seperti melakukan *merger*, mengembalikan izin usaha, dan tidak sanggup mengikuti ketentuan regulasi.

Sebagai gambaran, pada April 2020 atau di awal masa pandemi Covid-19, jumlah perusahaan pembiayaan masih terdapat 183 perusahaan. Saat ini, jumlahnya menciut menjadi 167 perusahaan yang bertahan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mengungkapkan bahwa pada dasarnya beberapa pemain industri pembiayaan ini sudah kesulitan sebelum pandemi melanda. Terutama, bagi mereka yang belum mampu memenuhi ketentuan modal minimal di bawah Rp100 miliar.

Sisanya, mereka yang mengalami kesulitan mencari *partner* usaha yang cocok, kualitas

pinjamannya menurun, faktor tata kelola yang diabaikan, atau berencana tidak melanjutkan bisnisnya jauh hari sebelum Covid-19 memasuki Tanah Air, atau tidak memenuhi rasio ekuitas terhadap modal disetor minimal 50 persen.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Dewi Astuti menjelaskan bahwa kebanyakan perusahaan pembiayaan (PP) yang tidak kuat memenuhi ketentuan biasanya lebih memilih mundur dan mengganti bisnisnya.

"Proses pemenuhan modal pemain industri pembiayaan terus dilakukan, dan sekarang ada yang dicabut izinnya, ada juga yang mengembalikan izin. Pertimbangan utama biasanya untuk mundur, tidak lagi sebagai perusahaan pembiayaan, berubah strategi bisnis, atau bidang usahanya, supaya tidak dalam peneraan sanksi," ujarnya, Rabu (4/8).

OJK terus mengimbau bagi perusahaan pembiayaan yang masih kesulitan untuk memenuhi ketentuan, terutama mereka yang independen dan bukan anak usaha korporasi besar, segera menyiapkan langkah. Mulai dari mencari *partner* strategis di segmen incarannya, aksi korporasi seperti *merger*, atau mulai mencari pemodal baru. (*)

APPI Dukung OJK Tutup Aplikasi Mata Elang

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup beberapa aplikasi mata elang pada Kamis, 29 Juli 2021.

Mata elang merupakan istilah populer yang merujuk salah satu tugas dari tim penagihan (*collector*) atau akrab disebut *debt collector*, baik dari *internal* perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga, yang profesinya mengamati pelat nomor kendaraan debitur bermasalah di sudut-sudut jalan.

Pasalnya, nomor unit kendaraan dari debitur yang telah menunggak cicilan berbulan-bulan ini akan terdata, dan mata elang bertugas 'melirik' unit tersebut ada di mana atau mau ke mana.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno merasa khawatir aplikasi yang memuat data-data nomor kendaraan dan pemilik dapat dipakai oleh oknum-oknum yang bisa memanfaatkan data debitur perusahaan pembiayaan bermasalah dalam aplikasi tersebut

untuk kemudian melakukan pemerasan atau penagihan tidak beretika.

"Terutama kalau oknum itu bukan pihak penagih yang resmi dan lolos sertifikasi. Jangankan yang tidak resmi, yang resmi saja kalau kita [perusahaan pembiayaan] belum memberikan surat tugas, tidak boleh ada upaya penagihan atau eksekusi," katanya.

Apalagi, aplikasi tersebut bisa dengan mudah menampilkan data-data debitur bermasalah hanya dengan penggunaanya membayar biaya berlangganan.

Suwandi menekankan bahwa perusahaan pembiayaan pasti akan berhati-hati berkaitan upaya *collection*, karena perusahaan juga bisa 'kena getahnya' apabila tidak menaati aturan yang berlaku. Dalam hal ini, yaitu mendapat hukuman dari OJK.

Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam penagihan, wajib memastikan bahwa sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur, sesuai aturan yang berlaku.

Setelah itu, *debt collector* yang bertugas harus membawa kartu identitas, sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, dan salinan sertifikat jaminan fidusia.

"Kami bersama OJK secara ketat mengawasi pelaksanaan jasa penagihan dari *internal* maupun pihak ketiga. Perusahaan, pengurus, sampai *debt collector* yang terjun ke lapangan, itu semua ada sertifikasinya, berlaku tiga tahun, kita juga evaluasi kinerja mereka secara profesional," tambahnya.

Harapannya, jangan sampai ekosistem bisnis pembiayaan dimana penagihan turut menjadi bagian di dalam menekan angka pembiayaan bermasalah, dirusak oleh sebagian oknum. (*)





Kualitas Debitur Restrukturisasi Perlu Terus Diawasi

JAKARTA — Perusahaan pembiayaan perlu terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas debitur yang turut dalam program restrukturisasi agar risiko bisnis di industri pembiayaan masih mampu terjaga di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W. Budiawan mengatakan bahwa OJK masih melakukan kajian apakah kebijakan *countercyclical* yang diberikan dalam POJK 58/2020 perlu diperpanjang atau tidak.

Hal terpenting bagi perusahaan pembiayaan, OJK terus mengingatkan agar senantiasa berhati-hati dalam mengimplementasikan ketentuan ini sesuai dengan *risk appetite* dan kapasitas masing-masing perusahaan.

"Portofolio debitur restrukturisasi dampak Covid-19 ini perlu terus dimonitor dan dikelola dengan baik, serta diantisipasi dampak terburuknya yang mungkin terjadi terhadap

perusahaan saat kebijakan *countercyclical* berakhir," ujarnya.

Seperti diketahui, debitur-debitur restrukturisasi yang terdampak Covid-19 berdasarkan ketentuan POJK 58/2020, saat ini masih dapat dilaporkan dalam kategori kualitas Lancar.

Oleh sebab itu, Bambang mengingatkan perusahaan pembiayaan agar terus menjalin komunikasi kepada setiap debitur yang masih berat untuk kembali membayar cicilan tersebut.

Setelah itu, perusahaan pembiayaan secepatnya mempertimbangkan langkah yang tepat, sehingga apabila periode restrukturisasi benar-benar berakhir, perusahaan sudah siap dan kualitas piutang pembiayaan tidak memburuk.

"Oleh sebab itu, periode ini harapannya masih dapat memberikan ruang gerak kepada perusahaan pembiayaan dan debitur, dalam menata ulang strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil sehingga dapat *survive* dalam menghadapi pandemi ini," tambahnya. (*)

Momentum Bank Salurkan Pinjaman ke Industri Pembiayaan



JAKARTA — Kinerja bisnis di industri pembiayaan selama masa pandemi Covid-19 tergerus cukup dalam. Daya beli masyarakat yang masih belum pulih, membuat permintaan pembiayaan cenderung lambat dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi.

Satu sisi, perusahaan pembiayaan sebagian besar masih mengatungkan layanannya ke sektor yang terkait dengan pembiayaan ke otomotif, baik itu kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua.

Saat pandemi Covid-19 melanda Tanah Air pada Maret 2020, penjualan kendaraan bermotor terpukul hebat. Situasi itu mulai bergerak naik di kuartal III/2020. Harapan mulai muncul ketika pemerintah dan otoritas menggulirkan insentif pada Maret 2021.

Belum pulihnya situasi bisnis di industri pembiayaan mempengaruhi tingkat kepercayaan bank dalam memberikan pendanaan bagi pelaku usaha pembiayaan. Selama ini, pendanaan bank menjadi satu penopang untuk bisnis pembiayaan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, pelaku usaha di industri pembiayaan menaruh

harapan besar kepada bank untuk kembali mendapatkan pendanaan.

Harapannya, industri pembiayaan terutama yang tidak memiliki afiliasi atau induk dengan entitas perbankan, masih memiliki ruang untuk menjalankan usaha.

"Memang bank sangat hati-hati dalam memberikan kredit. Kami berharap bisa kembali bersinergi. Kami selalu menyampaikan ke bank, ini saatnya bank masuk kembali, menyalurkan pembiayaan ke industri pembiayaan," katanya dalam webinar Asset Recovery Strategy During Pandemi yang berlangsung pada 26 Juli 2021.

Dia memastikan perusahaan pembiayaan juga telah mengukur risiko dan memiliki kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada debiturnya. Apalagi, perusahaan pembiayaan mengukur profil risiko calon debiturnya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Di tengah pandemi, perusahaan pembiayaan tetap menunjukkan itikad baik. Dari 23 juta kontrak di industri pembiayaan, sekitar 5,76 juta mengajukan permohonan restrukturisasi. Dan 5,14 juta di antaranya disetujui." (*)

Perkuat Bisnis, Arthaasia Finance & Hitachi Capital Finance Indonesia Merger

JAKARTA — PT Arthaasia Finance resmi melakukan penggabungan usaha atau *merger* dengan PT Hitachi Capital Finance Indonesia. Penggabungan itu dapat memperkuat bisnis perseroan karena kedua perusahaan sebelumnya bergerak dalam bidang pembiayaan yang berbeda.

Presiden Direktur Arthaasia Finance Ryuichi Inoue menjelaskan bahwa sejak 1 Juli 2021, *merger* antara perseroan dengan Hitachi Capital Finance Indonesia telah berlaku efektif. Setelah penggabungan usaha, nama perusahaan yang berlaku adalah Arthaasia Finance.

Ryuichi menjelaskan bahwa kedua perusahaan memiliki fokus bisnis yang berbeda. Penggabungan usaha itu dinilai dapat membawa efek sinergi sehingga memperkuat posisi Arthaasia Finance di kancah industri pembiayaan Indonesia.

"Hitachi Capital Finance Indonesia adalah perusahaan *leasing* & pembiayaan non-mobil, sedangkan Arthaasia Finance mengkhususkan diri dalam pembiayaan mobil, karenanya kami mengharapkan ada efek sinergi yang lebih besar di masa depan," tulis Ryuichi dalam pengumuman resminya.

Dia menjelaskan bahwa visi perseroan adalah berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan standar hidup di Indonesia dengan mengembangkan bisnis pembiayaan. Arthaasia Finance pun mendorong pembiayaan yang dapat menciptakan nilai sosial bagi masyarakat.

Menurutnya, dengan visi itu, Arthaasia Finance akan terus berupaya menjadi perusahaan pembiayaan yang bernilai tinggi. Hal tersebut akan ditunjang oleh kontribusi kedua perusahaan yang telah bergabung.

"Semua karyawan akan bekerja sama untuk menjalankan bisnis yang unik dan progresif dengan mempertimbangkan lingkungan global," tulis Ryuichi.

Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anggar Budhi Nuraini menjelaskan bahwa berlakunya *merger* kedua perusahaan membuat pihaknya mencabut izin Hitachi Capital Finance Indonesia. Hal itu tercantum dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.05/2021 pada 9 Agustus 2021.

Berlakunya penggabungan usaha kedua perusahaan membuat Arthaasia Finance harus menanggung dan bertanggung jawab atas seluruh kewajiban Hitachi Capital Finance.

"Sejak tanggal efektif penggabungan PT Hitachi Capital Finance Indonesia ke dalam PT Arthaasia Finance, PT Arthaasia Finance selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas seluruh aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, aktiva, dan passiva dari PT Hitachi Capital Finance Indonesia sebagai akibat dari penggabungan dimaksud." (*)



TINGKATKAN KUALITAS KREDIT MELALUI MITIGASI RISIKO DENGAN *CREDIT SCORING*

IdScore+

data. insight. moves you forward



Kini analisa kredit menjadi kian akurat dan mudah. **IdScore+** memungkinkan analisa lebih mendalam dan komprehensif berbasis profil dan data kredit historis debitur yang lengkap dan terkini. Semua informasi untuk mendalami karakter debitur seperti identitas, *credit score*, kemungkinan gagal bayar, riwayat fasilitas, riwayat pembayaran, dan informasi lainnya terangkum lengkap jadi satu, mudah dipahami dan diakses. Tunggu apa lagi, ayo manfaatkan **IdScore+** untuk analisa cermat dan keputusan tepat dengan risiko terukur.

Mengapa harus IdScore+



Profil Debitur Lengkap
dan Terkini



Data Akurat
dan Kredibel



Mudah Dipahami
dan Diakses

CREDIT SCORE IDSCORE+

Credit Score	637	Kategori Risiko	D1
Kemungkinan Gagal Bayar	7.78 ↓	Keterangan	Risiko Tinggi
Kemungkinan gagal bayar subyek dalam 1 tahun ke depan (range 0%-100%)		Credit Score: Kapabilitas subyek dalam memenuhi kewajiban kreditnya (range 250-900)	
		Tingkat risiko berdasarkan skor (Range A1-E3)	



Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan lainnya.

PT PEFINDO Biro Kredit

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T: (62-21) 5154501 | F: (62-21) 5154503

www.IdScore.id
[IdScore Indonesia](#)
[IdScore](#)

[IdScore](#)
[idscore.id](#)
[IdScore_Ind](#)





Lelang Kendaraan Lesu Selama Pandemi

JAKARTA — Terbatasnya kegiatan penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan selama pandemi Covid-19, turut mempengaruhi aktivitas lelang kendaraan.

Menurut Ketua Persatuan Balai Lelang Indonesia (Perbali) Daddy Doxa Manurung, lelang kendaraan perusahaan pembiayaan yang masuk ke Balai Lelang Serasi (Ibid) turun sekitar 20%—25% sepanjang 2021. Nilai penurunan itu tidak berbeda jauh sejak pembatasan sosial skala berskala besar (PSBB) diberlakukan.

“Penurunan itu sebagian besar karena adanya kebijakan relaksasi pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan,” kata Daddy dikutip dari Kontan.co.id, Senin (23/8/2021).

Selain relaksasi, katanya penurunan bisnis perusahaan pembiayaan turut andil mengurangi jumlah kendaraan yang dilelang. Saat ini perusahaan lebih selektif menyalurkan pembiayaan otomotif agar kualitas pembiayaan juga terjaga.

Pada 2019, lelang kendaraan bisa mencapai kisaran 8.000 unit—10.000 unit. Jika di rata-rata, balai lelang melakukan kegiatan lelang 800 unit kendaraan per bulan. Ada sekitar enam perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam lelang IBID.

PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) memilih pendekatan antisipasi penurunan realisasi pembiayaan mobil bekas lewat menggelar lelang secara *online* ditambah *bundling* program pembiayaan.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengungkapkan lewat langkah ini, kendaraan bekas pengembalian debitur bisa terjual dengan penurunan nilai yang minim atau bahkan lebih baik, sekaligus menjadi *outstanding* baru di segmen mobil bekas.

“Proses lelang digital telah dilakukan sebanyak 13 kali dengan nilai jual yang lebih baik sekitar 11 persen dibanding lelang secara fisik. Ke depannya, lelang digital atau *online* ini akan kami buka untuk seluruh komunitas, maupun masyarakat umum,” ujarnya. (*)

Harga Saham Emiten Perusahaan Pembiayaan Cerah

JAKARTA — Kinerja bisnis riil perusahaan pembiayaan yang masih dibayangi pandemi Covid-19, *relative* tidak mengganggu prospeknya di bursa saham. Emiten pembiayaan yang melantai di bursa, mencatat pertumbuhan yang lumayan tinggi hingga pertengahan tahun ini.

Harga saham emiten perusahaan pembiayaan mayoritas berada di zona hijau. Tercatat, ada enam dari 10 emiten perusahaan pembiayaan yang masih membukukan pertumbuhan harga saham.

PT BFI Finance Tbk., mencetak pertumbuhan harga saham yang menjanjikan. Harga saham emiten dengan sandi BFIN itu membukukan imbal hasil hingga 47% sejak akhir Desember 2020 sampai dengan penutupan perdagangan pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Jika melihat laporan keuangannya untuk semester satu, pendapatan BFIN turun 19,65%. Namun, labanya masih cukup baik dengan pertumbuhan hingga 46,7% secara tahunan.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan bahwa pergerakan harga saham sebagai dinamika pasar. Menurutnya, investor ritel saham BFIN saat ini cukup besar hingga *volume* transaksi juga sangat likuid.

“Dulu pemegang saham BFIN hampir 90% asing, tapi sekarang porsi investor domestik sudah

meningkat signifikan,” ujar Sudjono dikutip dari Kontan.co.id.

Demikian pula dengan harga saham PT KDB Tifa Finance Tbk. Harga saham emiten dengan sandi TIFA itu mencetak imbal hasil sampai dengan 54% sejak akhir 2020 sampai dengan pertengahan Agustus tahun ini.

Padahal pendapatan perusahaan hingga paruh pertama tahun ini mengalami penurunan sebesar 31,90% yoy menjadi Rp 55,47 miliar. Namun, perusahaan juga masih mencatatkan pertumbuhan laba 13,42% menjadi Rp 15,73 miliar.

Head of Investment Research PT Infovesta Utama, Wawan Hendrayana menilai prospek industri pembiayaan saat ini sudah mulai membaik. Perbaikan prospek pembiayaan terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga membaik dari awal masa pandemi Covid-19 di tahun lalu.

Karena itu, Wawan melihat ada kepercayaan dari investor di bursa saham bahwa industri pembiayaan masih akan terus naik. Dan, pendapatan perusahaan pembiayaan juga diharapkan semakin membaik.

Hanya saja, Wawan menyarankan agar investor tidak terburu-buru mengambil posisi, dan *wait and see* saham-saham perusahaan pembiayaan. (*)





Pasar Mobil dan Motor Bekas Stabil

JAKARTA — Penyaluran pembiayaan untuk kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan sepanjang Januari—Juni 2021 belum sepenuhnya pulih. Namun, pembiayaan yang disalurkan untuk kendaraan bermotor bekas, masih terjaga dan cenderung tumbuh.

Adanya subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk beberapa jenis mobil baru, belum mendongkrak penjualan karena keterbatasan pasokan di *dealer*. Adanya subsidi PPnBM sempat dikhawatirkan memukul bisnis kendaraan bekas.

Akan tetapi, yang terjadi sebaliknya. Saat pembiayaan kendaraan baru masih mengalami kontraksi, pembiayaan kendaraan bekas melaju.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan bermotor roda dua bekas

tumbuh 7,07% sepanjang Januari—Juni 2021. Sementara itu, pembiayaan mobil bekas masih mengalami kontraksi 1,72%.

Jika dilihat secara bulanan, pembiayaan kendaraan bermotor dan mobil baru, mulai beranjak tumbuh sejak Maret 2021 hingga Juni 2021.

Debitur pembiayaan mobil bekas, kebanyakan benar-benar berniat mengincar jenis mobil lawas tertentu yang diminatinya. Hal ini mendorong potensi debitur perusahaan pembiayaan kendaraan bekas semakin besar, karena mereka tidak terlalu terpengaruh momentum PPnBM, justru mereka merasa senang karena harga mobil bekas incarannya turun.

Selain itu, dari sisi bisnis pembiayaan, kelebihan mobil bekas adalah depresiasi mobil

sudah tidak sebesar dan secepat mobil baru. Sehingga, apabila terjadi kelalaian bayar angsuran yang menyebabkan terjadinya pengambilan kembali jaminan, tingkat kerugian biasanya tidak terlalu besar.

PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) memilih pendekatan antisipasi penurunan realisasi pembiayaan mobil bekas lewat menggelar lelang secara *online* ditambah *bundling* program pembiayaan.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengungkapkan lewat langkah ini, kendaraan bekas pengembalian debitur bisa terjual dengan penurunan nilai yang minim atau bahkan lebih baik, sekaligus menjadi *outstanding* baru di segmen mobil bekas.

"Proses lelang digital telah dilakukan sebanyak 13 kali dengan nilai jual yang lebih baik sekitar 11 persen dibanding lelang secara fisik. Ke depannya, lelang digital atau *online* ini akan kami buka untuk seluruh komunitas, maupun masyarakat umum," ujarnya.

Sementara itu, PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengaku tetap mendapatkan berkah dari mobil baru maupun mobil bekas, yang masing-masing seimbang dan jumlahnya mendominasi hingga 70% dari pembiayaan yang disalurkan.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan PT JACCS MPM Finance mendapatkan berkah dari moncernya permintaan pembiayaan mobil bekas dan motor baru pada semester I/2021.

Hajimu Yukimoto, Finance Director JACCS MPM Finance mengungkapkan bahwa kenaikan dari dua produk tersebut, telah mampu menahan kontraksi akibat pembiayaan mobil baru yang masih lebih rendah.

"Ini dipengaruhi pada tiga bulan pertama 2020, bisnis masih berjalan seperti biasa, belum ada pembatasan sosial. Tetapi pembiayaan mobil bekas telah mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 8,7%, demikian juga pembiayaan motor baru mengalami sedikit peningkatan sebesar 4,5% dibandingkan semester I/2020," ujarnya.

Hajimu menjelaskan ke depan pihaknya masih menjalankan strategi untuk lebih fokus kepada pembiayaan mobil penumpang daripada pembiayaan mobil komersial. Terutama dalam



Adanya subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk beberapa jenis mobil baru, belum mendongkrak penjualan karena keterbatasan pasokan di *dealer*. Adanya subsidi PPnBM sempat dikhawatirkan memukul bisnis kendaraan bekas.

situasi Covid-19, yang harus sangat selektif dan *prudent* dalam memberikan pembiayaan mobil komersial.

Pengamat Otomotif Bebin Djuana mengungkapkan *dealer* mobil bekas justru tengah gencar menjaring pembeli yang mau bertransaksi lewat perusahaan pembiayaan. Apalagi, yang mau mengambil tempo cicilan dalam waktu lama, karena *dealer* akan mendapatkan komisi.

"PPnBM membuat harga mobil bekas turun. Jadi *dealer* pasti nggak mau ada pembeli yang bayar *cash*. Pasti akan dirayu terus supaya mengambil pembiayaan yang tenor lama, biar komisi dari perusahaan pembiayaan besar. Ini lumayan buat sedikit menutup rugi penurunan harga." (*)

DORONG EFISIENSI INDUSTRI

OJK Susun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan berkelanjutan periode 2021—2025. Satu yang menjadi fokus yakni penguatan ekonomi dengan memperkuat risiko terhadap perubahan iklim.

Regulator berharap dengan adanya penguatan risiko terhadap perubahan iklim atau *risk management on climate change*, akan meningkatkan efisiensi bagi industri jasa keuangan ke depan.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa pihaknya semakin fokus pada penguatan ekonomi berkelanjutan ke depan.

“OJK akan memasukkan *risk management on climate change* ini sebagai salah satu basis dalam

pengawasan lembaga keuangan dan perbankan,” ujarnya, Kamis (26/8/2021).

Menurut Wimboh, inisiatif keuangan berkelanjutan sudah harus dilakukan, karena jika tidak dilakukan maka akan ada biaya yang lebih mahal yang harus dibayarkan.

“Karena itu, lebih bagus kita bersiap dari pada nanti *cost*-nya cukup besar bagi generasi ke depan,” katanya.

Dia mengapresiasi pelaku sektor keuangan yang telah menjadi pelopor pembiayaan berkelanjutan atau *green financing* di Indonesia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahrudaz menuturkan lembaga keuangan itu berkomitmen memanfaatkan sumber-sumber pendanaan, salah satunya pasar modal. Upaya SMI menerbitkan





OJK akan memasukkan *risk management on climate change* ini sebagai salah satu basis dalam pengawasan lembaga keuangan dan perbankan.

—Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)

obligasi hijau pertama di Indonesia pada 2018 merupakan bagian dari upaya diversifikasi sumber-sumber pendanaan.

“Hasilnya memang tidak besar, penerbitan pertama Rp500 miliar. Tapi itu akan mendorong kami untuk melakukan penyaluran pembiayaan ke arah proyek-proyek yang sifatnya lebih ramah lingkungan,” ujar Edwin.

Hasil obligasi hijau 2018 dari SMI itu telah digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, yaitu pembangunan pembangkit listrik minihidro Tunggang di Bengkulu, dan juga di Lubuk Gadang yang telah rampung serta proyek transportasi LRT Jabodebek.

Dalam keterangan resminya, OJK mencatat sektor jasa keuangan di Tanah Air cukup stabil sampai dengan Juli 2021 yang tecermin dari angka pertumbuhan yang positif seperti intermediasi

perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal.

Dalam periode Januari sampai dengan Juli 2021, perbankan telah mengucurkan kredit sebesar Rp1.439 triliun. Namun dalam periode yang sama terdapat pelunasan dan pembayaran angsuran kredit termasuk dari beberapa debitur besar yang mencapai Rp1.332 triliun.

OJK mencatat, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 tumbuh positif didorong pengeluaran Pemerintah yang tinggi dan perbaikan pada konsumsi rumah tangga.

Walaupun indikator-indikator ekonomi pada awal kuratal II/2021 mengindikasikan kembali adanya tekanan karena penerapan PPKM, namun, dengan mulai turunnya kasus aktif Covid-19 di akhir Agustus 2021 yang disertai dengan percepatan vaksinasi diharapkan dapat mendorong kembali kenaikan mobilitas masyarakat serta pemulihan ekonomi.

Sementara itu, profil risiko lembaga jasa keuangan pada Juli 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL *gross* tercatat sebesar 3,35% (NPL net: 1,09%) dan rasio *nonperforming finance* (NPF) perusahaan pembiayaan Juni 2021 turun pada 3,95%.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/*non-core deposit* dan alat likuid/DPK per Juli 2021 terpantau masing-masing pada level 149,32% dan 32,51%, di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. *Capital Adequacy Ratio* industri perbankan tercatat sebesar 24,67%, jauh di atas *threshold*. *Risk-Based Capital* industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 653,74% dan 346,73%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%.

Begitupun *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,99 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. (*)

Mengintip RUU KUP yang Baru

JAKARTA — Reformasi perpajakan terus dilakukan pemerintah untuk memperkuat struktur penerimaan negara yang selama ini tergantung pada setoran Pajak Penghasilan (PPH).

Salah satu bentuk reformasi itu adalah perubahan skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Rencananya, dalam RUU tersebut pemerintah akan mengubah skema PPN dari tarif tunggal yang selama ini berlaku yakni 10% menjadi multitarif dengan tarif umum sebesar 12%.

Adapun barang yang dianggap sebagai kebutuhan dasar akan dikenakan tarif lebih rendah yakni di kisaran 5% atau 7%, sedangkan barang yang tergolong mewah menggunakan tarif tertinggi yakni 25%.

Pemerintah juga menjadikan hampir seluruh barang dan jasa sebagai barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP), tak terkecuali untuk kebutuhan pokok seperti bahan pangan pokok, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan RUU KUP tersebut, beberapa sektor yang menurut UU sebelumnya tidak dikenakan pajak, kini dikenakan pajak. Di antaranya adalah jasa keuangan.

Ini lah yang kemudian menimbulkan polemik karena pemerintah dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Seluruh lapisan masyarakat pun menolak pengenaan pajak untuk kebutuhan dasar ini, terutama bahan pokok.

Dalam perkembangannya, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengakomodasi suara masyarakat. Salah satunya memberikan fasilitas tidak dipungut PPN untuk bahan pangan.

Dalam fasilitas ini, bahan pokok tetap menjadi BKP hanya saja dalam praktiknya tidak dipungut PPN sehingga menihilkan beban kepada konsumen.

Opsi lain yang ditawarkan adalah tetap memberikan fasilitas pengecualian untuk bahan pokok. Dengan demikian, bahan pokok bukan menjadi BKP sebagaimana yang selama ini berlaku.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa posisi sementara ini masih tetap seperti di dalam RUU KUP.

Artinya, bahan pokok dikenakan PPN tetapi akan dipilih mana yang akan dikenakan dan yang tidak dikenai tarif. Dengan kata lain, tidak seluruh jenis bahan pokok akan dikenai pajak.

"Kita juga sedang mendesain skema pengenaan PPN-nya, apakah tarif normal, tarif

lebih rendah, atau tarif final. Kita tunggu saja hasil pembahasan RUU nanti,” kata dia.

Adapun untuk jasa kesehatan, yang akan dipajaki oleh pemerintah hanya layanan medis yang di luar kebutuhan dasar, misalnya perawatan kecantikan dan sejenisnya.

Sementara itu, jasa kesehatan dasar yang diakomodasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mendapatkan perlakuan khusus. Hal sama juga berlaku bagi jasa pendidikan.

“Jasa kesehatan yang tercover BPJS kita lepaskan dari unsur PPN. Tapi kalau klinik kecantikan dan lain-lain itu memang bukan kebutuhan dasar kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) dalam keterangan resminya menyatakan penerapan RUU KUP akan semakin meningkatkan penerimaan PPN pada 2022 sekitar Rp 175,8 triliun. Akan tetapi karena PPN tersebut ditanggung oleh konsumen, kebijakan itu berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Selain itu, disebutkan dampak kebijakan PPN juga akan berpotensi menyebabkan produk domestik bruto (PDB) berkurang sekitar 0,27%. Himbara memperhitungkan akan terjadi juga kenaikan inflasi dengan estimasi menjadi kurang lebih 4% pada 2022

Dengan demikian, penerapan PPN akan menyebabkan biaya *loan* semakin besar dan akan

mempengaruhi *forward linkage* perbankan atau sektor rill. Alhasil, perkembangan sektor rill akan terhambat.

Himbara mengukur kebijakan PPN saat ini sebenarnya sudah tepat dan juga merupakan kebijakan yang berlaku di banyak negara. Salah satunya di Uni Eropa dan mayoritas negara telah menerapkan pengecualian PPN untuk sektor keuangan, khususnya yang *interest-based*.

Himbara menimbang-nimbang dengan adanya penerapan PPN tersebut kemungkinan akan mengurangi defisit anggaran dari 6% menjadi 4,1% sampai 4,29% dari PDB. Selain itu PPN juga dapat mengarahkan pada *sovereign rating* Indonesia yang kembali baik, alias dengan kembali ke *prudent fiscal* dengan maksimal defisit 3% dari PDB.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan bahwa implementasi skema pungutan PPN multitarif tidak akan mudah bagi wajib pajak dan pemerintah.

Pasalnya, skema ini memperumit pembukuan pajak sehingga menimbulkan kompleksitas bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Masalah lain, jelas Tauhid, akan terjadi kesulitan dalam audit PPN.

Di sisi lain, adanya perlakuan yang berbeda antar BKP dan wajib pajak berisiko menimbulkan sengketa. “Karena konsekuensi kenaikan PPN, maka harga akan naik,” kata dia.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menambahkan, ditetapkannya seluruh produk dan jasa menjadi BKP dan JKP akan memperumit sistem administrasi perpajakan.

Pasalnya, hal ini akan meningkatkan *compliance cost* dari sisi penjual, yang harus berstatus pengusaha kena pajak (PKP), membuat faktur pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN, serta menjalani pemeriksaan oleh petugas pajak jika wajib pajak mengajukan restitusi.

Adapun dari sisi petugas pajak, akan meningkat *administration cost* karena jumlah PKP dan pemeriksaan SPT PPN meningkat. Risiko lain dari kebijakan ini adalah meningkatnya gugatan ke penegak hukum oleh wajib pajak.

“Jika terjadi *tax dispute*, potensi proses keberatan hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung [MA] juga meningkat,” kata dia. (*)



EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Jalur Pengadilan Hanya Alternatif



JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan langkah eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri tidak mutlak harus dilakukan. Lembaga pengadilan hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa jika tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur.

Dalam materi pertimbangan terkait dengan putusan uji materi No. 2/PUU-XIX/2021, Hakim Daniel Yusmic menyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.

“Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri,” katanya dikutip dari putusan MK.

Uji materi tersebut diajukan oleh Joshua Michael Djami yang menguji Pasal 15 ayat 2 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kendati uji materi yang diajukan oleh Joshua itu ditolak, penegasan Hakim MK memperkuat perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia karena adanya wanprestasi oleh debitur memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Pertimbangan Hakim MK itu juga menepis pandangan masyarakat bahwa setiap eksekusi jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan atau melalui proses pengadilan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menghargai dan memberi apresiasi atas putusan yang telah diumumkan oleh MK kendati uji materi yang diajukan oleh pegawai perusahaan pembiayaan tersebut tidak dikabulkan oleh Hakim MK.

Bepegang pada Keputusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2021, tersebut, kata Suwandi eksekusi fidusia melalui pengadilan hanyalah menjadi sebuah alternatif, bukan kewajiban.

“Walaupun Hakim MK menolak permohonan Joshua, namun perlu dicatat dalam keputusan MK soal eksekusi fidusia, memberikan kejelasan kepada semua pihak baik kreditur dan debitur bahwa eksekusi fidusia dapat dilaksanakan oleh pihak penerima fidusia dan jika ada perkara yang harus dibawa ke pengadilan adalah bukan kewajiban melainkan alternatif. Dengan demikian hak eksekutorial fidusia tetap dapat dilaksanakan,” jelasnya.

Hal senada pernah disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM, Iwan Supriadi.

Menurut Iwan, pascaputusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, masih muncul beragam pandangan dari pelaku usaha dan masyarakat terkait dengan eksekusi jaminan.

Kementerian Hukum dan HAM, katanya terus melakukan sosialisasi terkait dengan putusan



Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

tersebut. Pada prinsipnya, putusan MK itu tidak serta merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksekusi jaminan fidusia.

Dia menuturkan putusan tersebut memberikan pemaknaan jika terdapat perselisihan, proses eksekusi dilakukan dengan mengajukan eksekusi ke pengadilan, bukan gugatan atau meminta putusan ke pengadilan.

Iwan Supriadi melanjutkan, keputusan MK tersebut memiliki tujuan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sepanjang sejalan dengan amar putusan MK yang dimaksud.

Selain itu, eksekusi jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) dapat dilakukan berdasarkan UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tidak pernah mencabut hak eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan sama dengan putusan pengadilan. (*)



FORUM KOMUNIKASI DAERAH (FKD)



Pada tanggal 30 Agustus 2021, FKD Surabaya memberikan bantuan sejumlah 225 paket sembako dalam rangka penanggulangan Covid-19 kepada Surabaya Peduli Bencana.



KEGIATAN BANTUAN SOSIAL



Pada tanggal 4 Agustus 2021, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memberikan bantuan beras dan *masker* kepada pengemudi ojek *online*.



Siapa Berani Menjadi

PEMBICARA PELATIHAN APPI

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengundang Bapak/Ibu beserta karyawan yang dipimpin untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pembiayaan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Berikut ini kriterianya:

UMUM

1. Memiliki passion di bidang pendidikan dan pelatihan
2. Minimal 5 tahun menjabat setingkat atau lebih tinggi dari Manager di Perusahaan Pembiayaan
3. Memiliki kecakapan mengajar termasuk membuat bahan pelatihan
4. Pernah ditempatkan di dalam divisi yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diajar min 2 tahun (misal : tertarik mengajar materi hukum, pernah di divisi hukum Perusahaan Pembiayaan)
5. Bersedia mengikuti pelatihan TOT APPI dan memenuhi syarat kelulusan yang ditentukan
6. Mendapatkan ijin untuk mengajar di APPI dari atasan atau direksi perusahaan

KHUSUS

1. Bersedia menjadi pembicara mak. 2 kali dalam 1 bulan @ 4 jam
2. Bersedia mengikuti secara penuh seleksi pembicara dan pelatihan bagi pembicara (ToT)
3. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan APPI dengan melampirkan CV terakhir

Link pengisian form pendaftaran Pembicara Pelatihan APPI:
<https://forms.gle/tQCzuBfoh2uV8VN79>

- > Formulir pendaftaran dikirimkan sebelum tanggal 20 September 2021
- > Hanya kandidat terpilih yang akan dipanggil dalam ToT APPI

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Sekretariat APPI : 021 - 2982 0190
Website: www.appi.id

DAFTAR ANGGOTA APPI

AB Sinar Mas Multifinance
Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Lt 9,
Jl. MH Thamrin Kav. 22/51,
Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10350
Tlp: 392 5660 Fax 392 5788

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
Millennium Centennial Center Lt 56
Jl. Jend. Sudirman No. Kav 25, RT.4/RW.2,
Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 39733232, 39733322
Fax: 39734949



ADICIPITA INOVASI TEKNOLOGI
Graha Adicipta Jl. Kebon Jeruk Raya No. 80
Jakarta Barat 11530
Tlp: 53673030

ADITAMA FINANCE
Plaza Bank Index, 8th Floor
Jl. M. H. Thamrin Kav. 57,
Jakarta Pusat
Tlp: 31931006 Fax: 31931016



AEON CREDIT SERVICE

AEON CREDIT SERVICE INDONESIA
3A Plaza Kuningan South Tower,
Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Jakarta 12940
Tlp: 252 3331 Fax: 5288 0232 / 0231

AKULAKU FINANCE INDONESIA
Gedung Sahid Sudirman Center Lt.18 Unit H
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220
Tlp: 50818930

AL IJAHAR INDONESIA FINANCE
Menara Palma Lt. 25
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 kav 6
Kuningan Jakarta 12950
Telp 021-57957552 / 7553 Fax 021-57957507

AMANAH FINANCE
Wisma Kalla Building Lt.3
Jl. Dr. Sam Ratulangi No.8
Makassar 90132
Telp: 0411 – 853210

ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE
Gading River View Blok H 56 B,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tlp: 45869941

ANDALAN FINANCE INDONESIA
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3
BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321
Tlp: 021-22356888 Fax: 021-22356899

ANUGERAH UTAMA MULTIFINANCE
Plaza ABDA Lt.6
Jl. Jend Sudirman Kav 59 Jakarta 12190
Tlp: 514 02228 Fax: 514 02224

ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE
Jl. Raden Tumenggung Suryo No. 28
Malang, Jawa Timur 65123
Tlp: 0341-491222 Fax: 0341-470079

ARMADA FINANCE
Jl. Jend. Sudirman No. 165, Magelang 56125
Tlp: (0293) 313777 Fax: (0293) 313888
Website: www.armada-finance.co.id

ARTHA PRIMA FINANCE
Grand Slipi Tower Lantai 32,
Jl. S. Parman Kav. 22-24 Slipi
Jakarta Barat 11480, Tlp: 2902 2071/72
Fax: 2902 2085, Website: www.arthaprima.co.id

ARTHAASIA FINANCE
Gedung Kencana Tower Lantai 5-6
Business Park Kebon Jeruk
Jl. Meruya Iir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620,
Telp. 021. 58908189 atau 021. 58908190
Fax. 021. 58908146

ASIA MULTIDANA
Jl. Pluit Indah Raya No. 31 Lt. 2
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Tlp: 22673031 / 22673038

ASIATIC SEJAHTERA FINANCE
Ruko Karawaci Office Park Excelis 51, Lippo Karawaci,
Tangerang 15810
Tlp: 5510200 Fax: 5510898



ASLI RANCANGAN INDONESIA
Senayan Business Center
Jl. Senayan No.39 Rawa Barat, Jakarta 12180
Tlp: 22775752 / 22775752

ASTRA AUTO FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220, 788 51198
Website: www.autocybercenter.com

ASTRA MULTI FINANCE
Menara FIF, Lt.7
Jl. TB. Simatupang Kav.15
Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12440
Tlp: 769 8899 Fax: 769 8811
www.fifgroup.co.id



ASTRA SEDAYA FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90 Tanjung Barat, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220, 788 51198
Website: www.autocybercenter.com

ASTRIDO PACIFIC FINANCE
Toyota Building 3rd Floor, Jl. Balikpapan Raya No. 7,
Jakarta 10160, Tlp: 231 2220, 231 2221
Fax: 231 0053/345 1334
Website: www.astrido-finance.co.id

ATOME FINANCE INDONESIA
District 8 Treasury Tower Lantai 53 Unit C Sudirman
Central Business District Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 54
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tlp: Fax:

BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO
Komp. Ruko Wolter Monginsidi
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 N
Jakarta Selatan
Tlp: 719 6488 Fax: 719 6489

BATAVIA PROSPERINDO FINANCE
Gedung Chase Plaza Lt. 12,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Tlp: 520 0434 Fax: 520 9160



BCA FINANCE
Wisma BCA Pondok Indah Lt.8, Jl. Metro Pondok Indah
Sektor I-S Kav. No. 10, Jakarta Selatan 12310
Tlp: 299 73100 Fax: 29973232/33



BCA MULTI FINANCE
Gedung WTC Mangga Dua Lantai 6 Blok CL 001
Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Jakarta Utara 14430
Tlp: 29648200

BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE
Hermina Tower Kav Blok B/10, Lantai 15,
Jalan HBR Motik No.4, RW 10, Gunung Sahari Selatan,
Kemayoran, Jakarta 10720
Tlp: 39700400

BETA INTI MULTIFINANCE
Ruko The Greencourt Blok D08
Jl. Boulevard Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Tlp: 5309331 Fax: 5363549



BFI FINANCE INDONESIA
BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapt. Soebijanto Djohadikusumo
BSD City, Tangerang
Tlp: 296 50300 Fax: 296 60757
www.bfi.co.id

BHUMINDO SENTOSA ABADI FINANCE
Jl. Balikpapan Raya No. 24 Lt. Dasar,
Jakarta Pusat 10130
Tlp: 632 1111 Fax: 631 8555

BIMA MULTI FINANCE
Jl. Cideng Barat No. 471, Jakarta Pusat
Tlp: 638 58555 Fax: 638 58001

BINTANG MANDIRI FINANCE
Graha Bintang Cikini,
Jl. Cikini Raya No 55, Menteng, Jakarta Pusat
Tlp: 3983 0391 Fax: 3192 4731/32



BNI MULTIFINANCE
Gedung BNI Life Insurance Lt. 5
Jl. Aipda KS Tubun No. 67
Jakarta Pusat 10260
Tlp: 290 22555 Fax: 290 22146

BOSOWA MULTI FINANCE
Menara Global Lt. 21
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 27
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 5275230



BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)
Lippo Kuningan Lantai 11 dan GF
Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12
Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Tlp: 5745333 Fax: 5745444



BUANA FINANCE
Tokopedia Tower
Ciputra World 2 Lt 38, Unit A - F
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta 12950
Tlp: 50806969 Fax: 50806996

BUANA SEJAHTERA MULTIDANA
Belleza Office Tower Lt. 12
Jl. Letjend Soepeno No 34 Arteri Permata Hijau,
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Tlp: 29022050-60 Fax: 29022070

DAFTAR ANGGOTA APPI

BUKOPIN FINANCE
Gd. Bank Bukopin Lt. 3
Jl. Melawai Raya No. 66, Jakarta Selatan 12160,
Tlp: 726 0756, 724 5014 Fax: 726 0865

BUMIPUTERA - BOT FINANCE
Wisma Bumiputera, 11th & 12th Floors,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Tlp: 570 6762, 522 4522 Fax: 525 561



BUSSAN AUTO FINANCE
BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 29396000 Fax: 29396100

CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE
Jl. Raya Kelapa Dua Ruko Blitz 2 Blok C No.17-19,
Paramount Serpong, Kel. Kelapa Dua, Tangerang 15810
Tlp: 22229200, 22229449

CAPELLA MULTIDANA
Jl. Sunter Paradise Timur Raya Blok G2 No. 4-5
Jakarta Utara
Tlp: 640 1001 Fax: 640 1003

CATERPILLAR FINANCE INDONESIA
Beltway Office Park Tower C
Level 3 unit #301-303, Jl. TB Simatupang No. 41
Jakarta Selatan 12550
Tlp: 29392999 Fax: 7804415

CATURNUSA SEJAHTERA FINANCE
Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1), South
Tower, Lantai 2, Zone 9, Jl Grand Boulevard, BSD Green
Office Park, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisaug,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15345
Tlp: (021) 29775800

CENTRAL JAVA POWER
Summitmas Tower I Lt. 15,
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62, Jakarta 12190
Tlp: 520 5041 Fax: 520 2474

CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA
Menara Astra Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav.5 Jakarta 10220
Tlp: 30404080 Fax: 30404081

CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
Gedung TMT 1 Lt.6,
Jl. Cilandak KKO Raya No. 1 Jakarta 12560
Tlp: 299 76650 Fax: 299 76651
www.csulfinance.com



CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Jalan Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15
Bintaro Jaya Sektor IX,
Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15229
Telp. (021) 2788-1800

CIPTADANA MULTIFINANCE
Plaza ASIA, Office Park 2-3,
Jl. Jend Sudirman Kav 59, Jakarta 12190
Tlp: 255 74800 Fax: 255 74900, 514 01020

CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH
Jl.R.S. Fatmawati No.29. Jakarta Selatan 12430
Telp : 021-7650222, 7662044 Fax : 021-7661337

CLEMONT FINANCE INDONESIA
Wisma Korindo 2nd Floor,
Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780
Tlp: 797 6363 Fax: 797 6371, 797 6368
www.clemontfinance.co.id



CLIPAN FINANCE INDONESIA
Gedung Wisma Silipti Lt. 6, Jl. Letjen. S. Parman
Kav. 12, Jakarta Barat 11480
Tlp: 530 8005 Fax: 530 8026/27
Website: www.clipan.com

COMMERCE FINANCE
Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 28, Tower A
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6,
Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80864285

DAINDO INTERNASIONAL FINANCE
Jl. KH Hasyim Ashari No. 35A Lt. 5
Jakarta Pusat 10150
Tlp: 6323308 Fax: 6323307

DANAREKSA FINANCE
Gedung Plaza BP Jamsostek Lt. 12
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta 12910
Tlp: 29555777 Fax: 3522495

DANASUPRA ERAPACIFIC
Tower C Lantai 5, 18 Parc Place, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp: 51401157 Fax: 51401159

DANA UNICO FINANCE
Gedung Dana Paint Lt.2, Jl. Pemuda Ujung,
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
Tlp: 29847799 Fax: 29834903



DIPO STAR FINANCE
Sentral Senayan II LT.3. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta
Tlp: 579 54100 Fax: 579 74567

EMPEROR FINANCE INDONESIA
Gedung Graha BIP, Lantai Mezzanine
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Tlp: 29660826 Fax: 29660816

EQUITY FINANCE INDONESIA
Wisma Hayam Wuruk Lt. 8, Jl. Hayam wuruk No.8 Kel.
Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tlp: 80632888

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Menara FIF, Jl TB Simatupang Kav. 15
Cilandak Barat, Jakarta 12430
Tlp: 769 8899 Fax: 7590 5599
Website: www.fifgroup.co.id

FINACCEL FINANCE INDONESIA
Dipo Tower, Lantai 3 Unit A-B,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260
Telp: 021-22055677

FORTUNA MULTI FINANCE
Jalan Sultan Syahrir Abdurahman No. 1A
Gedung Aneka Paviliun Lt.5, Pontianak
Tlp: Fax:

FUJI FINANCE INDONESIA
Menara Sudirman Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta 12190
Tlp: 5226509 Fax: 5226517

GLOBALINDO MULTI FINANCE
Gedung Victoria Lantai 3 Unit 305
Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47-51
Jakarta Selatan
Tlp: 7396949

GROUP LEASE FINANCE INDONESIA
Jl. Cideng Barat No. 23B
RT/RW 12/01, Cideng, Gambir
Jakarta Pusat 10140
Tlp: 6312194 Fax: 22636302

HASJRAT MULTIFINANCE
Jl. R.P. Soeroso 38, Jakarta 10350
Tlp: 390 5912-14, 390 0719. Fax: 314 0609, 390 4114

HEWLETT-PACKARD FINANCE INDONESIA
Prudential Centre, Kota Casablanca
Level 9, unit A-H. Jl. Casablanca Kav. 88
Jakarta Selatan 12870. Tlp: 29639999

HEXA FINANCE INDONESIA
Ged. Atrium Mulia, Lt. 2 Suite 205,
Jl. HR Rasuna Said Kav. B 10-11
Jakarta Selatan 12910
Tlp: 29039510 Fax: 29039511

HINO FINANCE INDONESIA
Indomobil Tower Lt. 17, Jl. MT. Haryono Kav. 11
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
Tlp: 29827960 Fax: 29827961



HOME CREDIT INDONESIA
Plaza Oleos Lantai 8 & 9 Jl. TB. Simatupang
No. 53A, Jakarta 12520, Indonesia
Telp: +62 21 295 39655 Fax: +62 21 227 80155

IFS CAPITAL INDONESIA
Rukan Cordoba Blok G No. 37
Jl. Marina Raya – Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
Tlp: 22573029 Fax:

DAFTAR ANGGOTA APPI



INDOCYBER GLOBAL TEKNOLOGI

Sampoerna Strategic Square, South Tower
Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
Tlp: 5663705 Fax: 5663704

INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE

Gedung Office 8 Lt.16 Unit G, Jl. Jend Sudirman
Kav. 52-53, Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 2933 3811 Fax: 2933 3810

INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

Indomobil Tower Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Tlp: 29185400 Fax: 29185401

INDOSURYA INTI FINANCE

Indosurya Center 10th Floor
Jl. M. H. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat 10110
Tlp: 3890 9021 Fax: 3890 0102



INOVASI MITRA SEJATI

Jl. Cideng Timur Raya No. 86A
Jakarta Pusat 10160
Tlp: 3456852 Fax: 3456934

INTAN BARUPRANA FINANCE

INTA Building 1st Fl
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta 14130
Tlp: 440 1408 Fax: 440 8441

INTI ARTHA MULTIFINANCE

Grand Slipi Tower Lt. 11.
Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480
Tlp: 29865829/39 Fax: 29865837

INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE

Gunung Sahari Raya Komp. Ruko Mangga Dua Square
Blok E. 19-20, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14430
Tlp: 6251900 Fax: 6252900

ITC AUTO MULTI FINANCE

Lantai 21 Gama Tower, Jl. HR Rasuna Said Kavling C 22,
Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Tlp: 22057027 Fax: 22057045

JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE

Lippo Kuningan 25th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.
B-12 Kuningan, Jakarta 12940
Tlp: 2971 0100 Fax: 2911 0313

JELAS KARYA WASANTARA (VERI JELAS)

Jl. Bangka Raya No. 21, Pela Mampang
Jakarta Selatan 12720
Tlp: 22718620



JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE

Jl. Pecanongan Raya No. 45,
Jakarta Pusat 10120
Tlp: 352 2238 Fax: 384 2104

KARYA TEKNIK MULTIFINANCE

Jl. Kali Besar Barat No. 37, Jakarta 11230
Tlp: 691 0382 Fax: 691 6267

KARUNIA MULTIFINANCE

Graha Anabatic Lt. 10, Jl. Scientia Boulevard Kav. U2,
Summarecon Serpong, Tangerang 15811
Tlp: 80636000 Fax: 80636001

KB FINANSIA MULTI FINANCE

SCBD LOT 28 OFFICE 8 LT. 15,
Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53, JAKARTA 12190,
TLP: 2933 3646 FAX: 2933 3648
WEBSITE: WWW.FINANSIA.COM

KDB TIFA FINANCE

Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-50941140

KOEXIM MANDIRI FINANCE

Equity Tower Lt. 50 Suite 50E SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-51400777

KOMATSU ASTRA FINANCE

United Tractors Head Office Wing Area 6th Floor,
Jalan Raya Bekasi KM 22
Jakarta 13910
Tlp: 4605948 Fax: 4605954

KRESNA REKSA FINANCE

Plaza ABDA Lantai 28,
Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta Pusat 12190
Tlp: 514 01725-27 Fax: 514 01728

LOTTE CAPITAL INDONESIA

Wisma Keiai 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.3, Jakarta
Tlp: 572 4255 Fax: 572 4256

MANDALA MULTI FINANCE

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2925 9955 Fax: 2925 9961
Website: www.mandalafinance.com

MANDIRI FINANCE INDONESIA

WISMA AMG, Jl. RS Fatmawati No. 29
Jakarta Selatan 12430
Telp: 750 9165 Fax: 750 9163
Website: www.mandirifinance.com

MANDIRI TUNAS FINANCE

Graha Mandiri Lantai 3A,
Jl. Iman Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Tlp: 230 5608 Fax: 230 5618
Website: www.mtf.co.id



MANDIRI UTAMA FINANCE

Plaza BAPINDO Menara Mandiri Lantai 26-27,
Jl. Jend Sudirman Kav.54-55 Jakarta Selatan
Tlp: 5278038 Fax: 5278039



MAYBANK INDONESIA FINANCE

Gd. Wisma Eka Jiwa Lt.10,
Jl. Mangga Dua raya. Jakarta Pusat 10730
Tlp: 623 00088 Fax: 623 00099

MAXIMA INTI FINANCE

Karawaci Office Park Blok A9,
Lippo Karawaci Tangerang 15811
Tlp: 5533555 Fax: 5535171

MEGA FINANCE

Jl. Wijaya I No. 19 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12170
Tlp: 728 00818 Fax: 728 00978

MEGA AUTO FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627/28 Fax: 536 66697/98

MEGA CENTRAL FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627, 536 66628 Fax: 536 66698

MITRA DANA TOP FINANCE

Gedung Top Center
Jl. KH Hasyim Ashari No. 13-13A Jakarta Pusat.
Tlp: 638 66017/18 Fax: 021-6307273

MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE INDONESIA

Mid Plaza 2 Building, lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta 10220
Telp. 573 5905 Fax: 573 5906

MITRA ADIPRATAMA SEJATI FINANCE

Gedung Graha Deka
Jl. Raya Kranggan No.120 RT 03 RW 006,
Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna,
Bekasi, Jawa Barat
Tlp: Tlp: 84596099 Fax:

MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA

Plaza Bank Index Lt. 11. Jl. MH Thamrin No. 57,
Gondangdia, Menteng. Jakarta Pusat 10350
Tlp: 3903238 Fax: 3903245
Website: www.mitsuilease.co.id

MNC FINANCE

MNC Financial Center Building 12th Floor,
Jl. Kebon Sirih No. 21-27. Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2970 1111 Fax: 3929938

MNC GUNA USAHA INDONESIA (MNC LEASING)

MNC Tower Lt.23. Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Kebon Sirih,
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 3910993 Fax: 3911093

MULTINDO AUTO FINANCE

Jl. Pandanaran No. 119A, Semarang 50243
Tlp: (024) 8311130
Fax: (024) 8445254, 8445650

DAFTAR ANGGOTA APPI

MUTIARA MULTI FINANCE
Aldeoz Building Lt.5,
Jl. Warung Buit Raya No.39, Kec.Pancoran
Jakarta Selatan 12740
Tlp: 27534112 Fax: 27534494

NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA
South Quarter Tower C Lantai 16 Unit A-I
Jl. RA Kartini Kav. 8 RT/RW 010/004
Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
Tlp: 80670388



NUSA SURYA CIPTADANA
Jl. Brigjen Katamso No. 5, Kel.
Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat
Tlp: 568 5000/3520504 Fax: 564 7732



ORICO BALIMOR FINANCE
Graha 137 Lt 7, Jl. Pangeran Jayakarta No. 137 Jakarta.
Tlp: 639 3877 Fax: 628 7950

ORIX INDONESIA FINANCE
Wisma Keiaji, 24th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta
Tlp: 572 3041 Fax: 572 3074

OTOMAS MULTI FINANCE
Komp. Dutamas Fatmawati Blok B.1 No. 25-26,
Jl. Raya Fatmawati No. 39,
Jakarta 12150
Tlp: 722 0279 Fax: 722 0881

OVO FINANCE INDONESIA
Jl. Lippo Kuningan Lt. 17 Unit D
Jl. HR Rasuna Said Kav B-12
Jakarta 12940

OTO MULTIARTHA
Gedung Summitmas II, Lantai 18,
Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Jakarta
Tlp: 522 6410 Fax: 522 6424
Website: www.oto.co.id

PACIFIC MULTI FINANCE
Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12A
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38
Jakarta 12710
Tlp: 39506144

PANN PEMBIAYAAN MARITIM
Gedung PT. PANN, Jl. Cikini IV No. 11
Jakarta Pusat
Tlp: 3192 2003 Fax: 3192 2980

PARAMITRA MULTIFINANCE
Kompleks Simprug Gallery,
Jl. Teuku Nyak Arief No.10-R, Jakarta 12220
Tlp: 727 87845 Fax: 727 87846
Website: www.pmf.co.id

PEFINDO BIRO KREDIT
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 5154501

PERMATA FINANCE INDONESIA
Gedung Waringin Group Lantai 3
Jl. Kesehatan No 22, Jakarta Pusat 10150
Tlp: 3867319 Fax: 3867321

POOL ADVISTA FINANCE
Jl. Soepeno Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau,
Kel. Grogol, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Tlp: 80626300

PPA FINANCE
Gedung Plaza BP Jamsostek, Lantai 10
Jl. HR Rasuna Said Kavling 112 Blok B, Jakarta 12940
Tlp: 021 - 5798 2255 Fax: 021 - 5798 2266

PRATAMA INTERDANA FINANCE
Wisma SMR Ground FI,
Jl. Yos Sudarso, Kav. 89, Jakarta 14350
Tlp: 650 2222 Fax: 650 8141

PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE
Menara Sentraya Lt.15
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Tlp: 27882088 Fax: 27882084

PROLINE FINANCE INDONESIA
Plaza Asia Lt. 8A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 51401260 Fax: 51401267

RABANA INVESTINDO
Jl. Tomang Raya No. 48A, Jakarta 11430
Tlp: 566 9808-10 Fax: 567 1646, 566 9820

RADANA BHASKARA FINANCE
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16,
Jl TB Simatupang No. 2 RT001/RW005,
Jakarta 12560
Tlp: 50503333

RAMA MULTI FINANCE
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 2DE
Jakarta Selatan 12790
Tlp: 7996345 Fax: 7996445

REKSA FINANCE
Ruko Patal Senayan
Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan
Blok B No. 3 & 5, Grogol Utara
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Tlp: 57940662 Fax:

RESONA INDONESIA FINANCE
Menara Mulia Building 7 FI Suite 701
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11,
Jakarta Selatan 12930
Tlp: 570 1956 Fax: 570 1961

RIDEAN FINANCE
Jl. Pemadam Kebakaran No. 11,
Jakarta Pusat 10410
Tlp: 633 1032, 633 2027 Fax: 633 1032

RINDANG SEJAHTERA FINANCE
Gedung Jaya Lt. 3, Jl. MH Thamrin No. 12, Jakarta.
Tlp: 2300919 Fax: 2300919

SAHABAT FINANSIAL KELUARGA
Metropolitan Tower 3rd Floor,
Jl. RA Kartini-TB Simatupang Kav. 14,
Jakarta Selatan 12430
Tlp: 27652022 Fax: 27652023

SAISON MODERN FINANCE
Menara Rajawali Lantai 10
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 57950571

SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA
AXA Tower Lt.32 Suite 03, Kuningan City
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Tlp: 30480655 Fax: 30480755

SATYADHIKA BAKTI MULTI FINANCE
Office Tower The Samator Lt. 9 Unit 8-10
Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28
Surabaya 60298
Tlp: 031-99004251

SGMW MULTIFINANCE INDONESIA
Sinarmas MSIG Tower Lt. 43
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, Jakarta
Tlp: 22535050 Fax:

SHAKTI TOP FINANCE
Gedung Top Center Jl. KH Hasyim Ashari
No. 13-13A, Jakarta Pusat
Tlp: 63866017 Fax: 6306880

SHARIA MULTIFINANCE ASTRA
Gedung Menara FIF Lt.3 Suite 303
Jl. TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Tlp: 7698899 Fax: 75905599

SHINHAN INDO FINANCE
Wisma Indomobil I Lt. 10,
Jl. MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta 13330
Tlp: 857 9095 Fax: 857 4171

SINARMAS HANA FINANCE
Gedung Roxy Square Lt. 3
Blok B 01 No. 2, Jakarta Barat 11440
Tlp: 56954670 Fax: 56954678



SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
Gedung Agro Plaza Lt. 17
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 No.1
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80864900 Fax: 80864950

SINARMAS MULTIFINANCE
Gedung Sinartama Gunita Lantai 3,
Jl. Lombok No. 71, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Tlp: 319 02888 Fax: 319 03589

SMART MULTI FINANCE
Jl. BSD Boulevard Utara, Foresta Business Loft 6 No.
20-21, BSD, Kab. Tangerang, Prov. Banten, 15331
Tlp: (021) 3972 1010, 3972 5050

SMFL LEASING INDONESIA
Menara BTPN Lt.31,
Jl. Dr. Ide. Agung Gde Agung, Kav. 5.5 - 5.6 Kawasan
Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80628710 Fax: 80628719

DAFTAR ANGGOTA APPI

SUMMIT OTO FINANCE
Summitmas II, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 252 2788, 522 6601 Fax: 252 6388
Website: www.otofinance.co.id

SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE
Jl. Sahid Sudirman Center Lantai 50 Unit A dan E.
Jalan Jend. Sudirman No.86
Jakarta Pusat 10220

SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
18 Office Park Lantai 23,
Jl. TB Simatupang No. 18. Jakarta 12520
Tlp: 781 7555 Fax: 781 9111, 788 47224



SUZUKI FINANCE INDONESIA
Jl. Raya Bekasi Km 19, Pulogadung
Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung
Jakarta Timur 13920
Telp: (021) 8060 7000

SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220
Website: www.autocybercenter.com

TAKARI KOKOH SEJAHTERA
Jl. Arjuna Utara No. 131, Tanjung Duren Selatan,
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Tlp: 564 0101 Fax: 560 3550

TEMPO UTAMA FINANCE
Tempo Scan Tower Lt. 3
Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan
Tlp: 29667879

TEZ CAPITAL AND FINANCE
Equity Tower Lt. 29,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 50666206

TIRTA FINANCE
Pacific Century Place, Lt 17, Jl Jend Sudirman Kav 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta
Tlp: 50847818

TOPAS MULTI FINANCE
Mayapada Tower 2, Lantai 14 unit 01A, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 27, Kelurahan Karet, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan
Tlp: 2524433

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
The Tower Lt. 9
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 12. Jakarta Selatan 12930
Tlp: 50821500 Fax: 50821501

TRANSPACIFIC FINANCE
Perkantoran Grogol Permai Blok G24
Jl. Prof. Dr. Latumenten Grogol, Jakarta 12980
Tlp: 5010 2222 Fax: 567 9406

TRIHAMAS FINANCE
Trihamas Building, Jl. TB Simatupang Kav. 11,
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 2933 0533 Fax: 2933 0543/44

TRIHAMAS FINANCE SYARIAH
Trihamas Building Lt. Dasar
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.11
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 29330530 Fax: 29330529

TRIPRIMA MULTIFINANCE
Jl. Joglo Raya No. 17B, RT.007 RW.003
(Sebelah Biznet Pos Pengumben)
Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11630
Telp: 22959040 Fax: 22959041

TRUST FINANCE INDONESIA
Gedung Artha Graha Lt. 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 515 5477 Fax: 515 5484

U FINANCE INDONESIA
Atria @Sudirman Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220
Tlp: 5711 109 Fax: 573 1139
Website: www.ufinance.co.id

USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA
Menara Batavia Lt. 27
Jl. K. H. Mas Mansyur Kav 126 Jakarta
Tlp: 5793 0008 Fax: 5793 0028

VARIA INTRA FINANCE
Asean Tower Jl. KH. Samanudi No.10 lt. 7.
Jakarta 10710
Tlp: 380 2865 Fax: 384 1015



VERENA MULTI FINANCE
Gedung Bank Panin Lt. 3,
Jl. Pecenongan no. 84,
Jakarta Pusat 10120
Tlp: 350 4890 Fax: 350 4891

WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
Altira Office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350
Tlp: 21882400 Fax: 21882420

WOKA INTERNATIONAL
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 38, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Tlp: 315 7501; 392 1358 Fax: 319 02809

Bagi anggota APPI yang ingin mencantumkan logo perusahaan harap menghubungi sekretariat APPI
di No. Telp: (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id

upcoming event

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Sekretariat APPI
Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D
Telp: (62-21) 2982 0190,
Fax: (62-21) 2982 0191,
Email: sekretariat@ifsa.or.id



Total Anggota 125 Perusahaan
122 Perusahaan Pembiayaan
3 Bank

ASSET REGISTRY SYSTEM

PT. Rapi Utama Indonesia
Kota Kasablanka Tower A Lantai 7 Unit D
Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 1287
T. 021 2283 6019
E. info@rapindo.co.id



Total Asset yang Aktif
12,95 juta asset
setara 66% data Nasional



BCAfinance

solusi tepat pembiayaan anda



FIX & CAP

TENOR



6

TAHUN

**ANGSURAN
LEBIH MURAH**